



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1  
TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, agar pelaksanaannya dilakukan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu merubah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah se-Provinsi Lampung;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam angka Romawi V nomor 5.5.1 angka 4 huruf C poin 12 Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  12. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khusus untuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap yaitu:
    - a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Sewa kendaraan dalam kota diperuntukkan bagi Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) yang melaksanakan tugas perjalanan dinas di kota tujuan dan tidak tersedia kendaraan dinas. Biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Dalam hal tidak dapat diperoleh bukti pengeluaran yang sah, maka untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas dapat membuat pernyataan penggunaan biaya riil sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan ini, ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
    - b. Biaya tiket pesawat udara dibayarkan sesuai dengan biaya riil (tiket dan boarding pass);
    - c. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
    - d. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

2. Lampiran III tentang Rincian Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

A. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PEJABAT NEGARA/PEJABAT/PNS/PTT DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD	TINGKAT PERJALANAN	TRANSPORTASI		
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
2	Sekretaris Daerah	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
3	Pimpinan dan Anggota DPRD	A	Bisnis	VIP/ Kelas IA	Spesialis/ Eksekutif
4	Eselon II	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
5	Eselon III/ Golongan IV/Non PNS Pendidikan S3	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
6	Eselon IV/ Golongan III/Non PNS Pendidikan S2/S1	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
7	Golongan II/I dan PTT/Non PNS Pendidikan Dibawah S1	E	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif

B. FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI

NO	PEJABAT, ESELON, PANGKAT/GOL	TINGKAT PERJALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	2	3	4	5
1.	Gubernur, Wakil gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD	A	Bintang Lima	Deluxe
2.	Eselon I	A	Bintang Lima	Deluxe
3.	Eselon II	B	Bintang Empat	Standar
4.	Eselon III/Gol IV/Non PNS Pendd. S3	C	Bintang Tiga	Standar
5.	Eselon IV/Gol III/Non PNS Pendd. S2/S1	D	Bintang Dua	Standar
6.	PNS Golongan II dan I/Non PNS Pendd. Dibawah S1	E	Bintang Satu	Standar

C. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	Tingkatan	Uang Harian Dalam Daerah (Rp)	Uang Representasi (Rp)	KETERANGAN
1	TINGKATAN A	550.000	180.000	
2	TINGKATAN B	450.000	120.000	
3	TINGKATAN C	350.000	-	
4	TINGKATAN D	250.000	-	
5	TINGKATAN E	200.000	-	

D. TARIF UANG HARIAN PERJALANAN DINAS KHUSUS DALAM IBUKOTA PROVINSI

NO	Tingkatan	Uang Harian Khusus Dalam Ibukota Provinsi (Rp)	KETERANGAN
1	TINGKATAN A	250.000	
2	TINGKATAN B	170.000	
3	TINGKATAN C	150.000	
4	TINGKATAN D	120.000	
5	TINGKATAN E	100.000	

E. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
(Uang Makan, Uang Saku dan Uang Representasi)

NO.	PROVINSI	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS & REPRESENTASI				
		GOL. A & Rep	GOL. B & Rep	GOL. C	GOL. D	GOL. E
1	2	3	4	5	6	7
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
2	SUMATERA UTARA	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
3	R I A U	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
4	KEPULAUAN RIAU	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
5	J A M B I	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
6	SUMATERA SELATAN	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
7	SUMATERA BARAT	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
8	BENGKULU	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
9	BANGKA BELITUNG	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
10	B A N T E N	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	950,000	815,000	750,000
11	JAWA BARAT	1,700,000 190,000	1,250,000 130,000	1,000,000	875,000	800,000
12	D.K.I JAKARTA RAYA	1,875,000 190,000	1,600,000 130,000	1,250,000	1,125,000	1,050,000
13	JAWA TENGAH	1,700,000 190,000	1,200,000 130,000	1,000,000	875,000	800,000
14	D.I. YOGYAKARTA	1,700,000 190,000	1,200,000 130,000	1.000.000	875,000	800,000
15	JAWA TIMUR	1,700,000 190,000	1,200,000 130,000	1,000,000	875,000	800,000
16	B A L I	2,375,000 190,000	1,850,000 130,000	1,500,000	1,200,000	1,125,000
17	NUSA TENGGARA BARAT	1,700,000 190,000	1,200,000 130,000	1,000,000	875,000	800,000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	1,600,000 190,000	1,150,000 130,000	900,000	850,000	750,000
19	KALIMANTAN BARAT	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000

20	KALIMANTAN TENGAH	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
21	KALIMANTAN SELATAN	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
22	KALIMANTAN TIMUR	1,750,000 190,000	1,350,000 130,000	1,000,000	875,000	750,000
23	SULAWESI UTARA	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
24	GORONTALO	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
25	SULAWESI BARAT	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
26	SULAWESI SELATAN	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
27	SULAWESI TENGAH	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
28	SULAWESI TENGGARA	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
29	MALUKU	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
30	MALUKU UTARA	1,500,000 190,000	1,125,000 130,000	850,000	750,000	700,000
31	P A P U A	1,900,000 190,000	1,400,000 130,000	1,200,000	1,000,000	950,000
32	IRIAN JAYA BARAT	1,800,000 190,000	1,350,000 130,000	1,100,000	950,000	875,000

F. TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
(Tiket dan Taxi Bandara)

NO	JURUSAN	TARIF PER KELAS DALAM RUPIAH		TAXI BANDARA (PP)
		BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5
1	Jakarta - Medan	2.500.000	758.000	400.000
2	Jakarta - Batam	1.600.000	800.000	400.000
3	Jakarta - NAD	2.600.000	900.000	400.000
4	Jakarta - Padang	2.292.900	1.436.000	400.000
5	Lampung - Jakarta	1.500.000	750.000	500.000
6	Jakarta - Palembang	1.603.600	926.000	400.000
7	Jakarta - Solo	1.603.600	926.000	390.000

8	Jakarta - Semarang	1.603.600	926.000	390.000
9	Jakarta - Yogyakarta	1.603.600	926.000	350.000
10	Jakarta - Surabaya	2.264.300	1.235.800	380.000
11	Jakarta - Pontianak	1.891.400	1.247.900	370.000
12	Jakarta-Palangkaraya	2.163.100	1.379.900	340.000
13	Jakarta - Banjarmasin	2.281.900	1.423.900	390.000
14	Jakarta - Mataram	2.307.200	1.420.600	390.000
15	Jakarta - Denpasar	2.302.800	1.448.100	480.000
16	Jakarta - Balikpapan	3.181.300	1.762.300	760.000
17	Jakarta-Ujungpandang	3.304.500	1.867.900	400.000
18	Jakarta - Manado	4.843.000	2.659.500	370.000
19	Jakarta - Biak	6.304.300	3.732.500	650.000
20	Jakarta - Jayapura	6.522.100	3.947.000	650.000
21	Jakarta - Timika	6.200.900	3.679.700	650.000
22	Medan - Banda Aceh	1.430.900	901.800	390.000
23	Yogyakarta-Denpasar	1.673.600	1.140.100	390.000
24	Balikpapan - Manado	2.004.700	1.467.700	400.000
25	Balikpapan-Ujungpandang	1.585.600	1.003.700	400.000
26	Balikpapan-Denpasar	2.265.000	1.388.300	480.000

G. TARIF TRANSPORTASI KENDARAAN UMUM DALAM DAERAH DARI BANDAR LAMPUNG

NO.	TUJUAN	TARIF	KETERANGAN
1.	Kab. Lampung Selatan	Rp.30.000	
2.	Kab. Tanggamus	Rp.32.000	
3.	Kab. Pringsewu	Rp.28.000	
4.	Kab. Pesawaran	Rp.25.000	
5.	Kab. Lampung Tengah	Rp.25.000	
6.	Kab. Lampung Timur	Rp.30.000	
7.	Kota Metro	Rp.25.000	
8.	Kab. Lampung Utara	Rp.30.000	
9.	Kab. Lampung Barat	Rp.70.000	
10.	Kab. Mesuji	Rp.70.000	
11.	Kab. Way Kanan	Rp.45.000	
12.	Kab. Pesisir Barat	Rp.70.000	
13.	Kab.Tulang Bawang	Rp.45.000	
14.	Kab. Tulang Bawang Barat	Rp.45.000	

H. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF RATA-RATA HOTEL				
			BINTANG LIMA	BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	1,308,000	1,080,000	410,000	340,000	250,000
2	SUMATERA UTARA	OH	1,030,000	650,000	470,000	310,000	300,000
3	RIAU	OH	1,075,000	720,000	450,000	380,000	300,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	930,000	650,000	380,000	280,000	200,000
5	JAMBI	OH	1,030,000	589,000	370,000	290,000	200,000
6	SUMATERA BARAT	OH	1,030,000	800,000	460,000	336,000	300,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1,000,000	591,000	429,000	280,000	250,000
8	LAMPUNG	OH	1,152,000	770,000	374,000	356,000	300,000
9	BENGKULU	OH	790,000	580,000	570,000	510,000	300,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1,030,000	600,000	451,000	300,000	250,000
11	BANTEN	OH	1,430,000	920,000	450,000	375,000	300,000
12	JAWA BARAT	OH	1,470,000	830,000	460,000	390,000	350,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1,000,000	650,000	610,000	400,000	350,000
14	JAWA TENGAH	OH	1,452,000	750,000	450,000	350,000	300,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	1,248,000	670,000	528,000	359,000	300,000
16	JAWA TIMUR	OH	1,152,000	768,000	390,000	380,000	350,000
17	BALI	OH	1,810,000	1,220,000	904,000	658,000	600,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1,082,000	550,000	540,000	360,000	300,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1,000,000	661,000	470,000	400,000	250,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1,130,000	740,000	430,000	318,000	250,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1,350,000	750,000	440,000	408,000	250,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1,420,000	770,000	500,000	379,000	250,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1,458,000	750,000	550,000	450,000	350,000
24	SULAWESI UTARA	OH	1,415,000	640,000	500,000	390,000	350,000
25	GORONTALO	OH	1,010,000	910,000	410,000	340,000	300,000
26	SULAWESI BARAT	OH	1,030,000	910,000	400,000	360,000	300,000
27	SULAWESI SELATAN	OH	1,000,000	853,000	495,000	371,000	350,000
28	SULAWESI TENGAH	OH	1,040,000	524,000	400,000	330,000	300,000

29	SULAWESI TENGGARA	OH	1,070,000	716,000	450,000	420,000	300,000
30	MALUKU	OH	1,030,000	680,000	412,000	280,000	200,000
31	MALUKU UTARA	OH	1,512,000	600,000	420,000	380,000	200,000
32	P A P U A	OH	1,260,000	720,000	460,000	380,000	350,000
33	PAPUA BARAT	OH	1,260,000	900,000	400,000	370,000	300,000

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 April 2013

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 1 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

ttd

**Ir. BERLIAN TH. MM.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP: 19601119 198803 1003**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR**